



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2017

Dinsosnakertrans Kab. Batang
Jl. Letjend R Suprpto No. 4 Batang
Telp (0285) 392320, Fax (0285) 392320

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran, proses kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP. Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Penyusunan LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Batang mengacu pada. Hasil pengukuran kinerja secara mandiri (self assessment) capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang tahun 2017 adalah **106,64%**. Hasil tersebut menjadi cambuk bagi Dinas Sosial Kabupaten Batang untuk terus meningkatkan capaian kinerja satu tahun ke depan.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2017, semoga LKJIP ini akan bermafaat bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang, dan menjadi inspirasi koreksi yang konstruktif.

Batang, Januari 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL,
KABUPATENBATANG**

SUGIATMO, SH., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610112 198903 1 011

DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	iii
	IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Gambaran Umum Dinsosnakertrans Kab. Batang	1
	B. Permasalahan Utama yang dihadapi	3
	C. Maksud dan Tujuan Lakip	3
	D. Dasar Hukum Penyusunan Lakip	3
	E. Sistematika Penyusunan Lakip Dinsosnakertrans Kab. Batang	4
BAB II	RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA	5
	A. Perencanaan Kinerja	5
	B. Penetapan Kinerja	7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	11
	A. Pengukuran Kinerja	11
	B. Analisa Hasil Pengukuran Kinerja	12
	C. Akuntabilitas Keuangan	15
BAB IV	PENUTUP	19
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017. Penyusunan LKJIP tahun 2017 pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017.

Keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi diukur melalui capaian indikator kinerja. Capaian indikator kinerja tahun 2017 yang menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan nilai 103,67 %
- b. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan nilai 116,67 %
- c. Untuk kinerja keuangan secara menyeluruh presentase penyerapan anggaran yang dikelola adalah sebesar 94,99%

Dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 106,64% persen, maka capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2017 masuk dalam kategori Sangat Baik.

Dalam upaya mewujudkan sasaran kinerja yang ada tentunya terdapat berbagai kendala yang di hadapi, adapun Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja adalah sebagai berikut :

1. Walaupun capaian kinerja tahun 2017 termasuk dalam kategori Sangat Baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
3. Perlu adanya perbaikan dan keselarasan sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja utama. Salah satu kendala penyusunan laporan kinerja ini adalah belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat. Dengan kata lain pengukuran kinerja tidak akan mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya apabila indikator kinerja tidak dirumuskan dengan tepat.

Dari anggaran secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 4.212.277.054,- terdiri dari belanja langsung maupun tidak langsung, yang terserap untuk mencapai sasaran dan tujuan kinerja adalah sebesar Rp 4.001.208.852,- (94,99%). Yang berarti terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 211.068.202,- (5,01%) yang kemudian kembali pada kas Daerah.

Melalui LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2017 ini, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program pada tahun mendatang sesuai dengan rencana dan sasaran strategis.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG

Dinas Sosial Kabupaten Batang Merupakan OPD Teknis yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang, serta Peraturan Bupati Peraturan Bupati Batang No 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Batang didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kabupaten Batang mempunyai sumber daya manusia sebanyak 25 pegawai, yang terdiri dari 23 orang PNS, 2 orang PTT. Gambaran tentang potensi kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan
Dinas Sosial Kabupaten Batang

No.	Klasifikasi	Jumlah
Menurut Struktur		
1	JPT	1
2	Administrastor	3
3	Pengawas	6
4	Pelaksana	15
Jumlah		25
Menurut Pendidikan		
1	Pasca Sarjana	2
2	Sarjana	10
3	Sarjana Muda	1
4	SLTA	6
5	SLTP	4
6	SD	2
Jumlah		15

2. Sarana Prasarana

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana Prasarana
Dinas Sosial Kabupaten Batang

Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
Tanah	6	2.673.500.000
Alat Angkutan	26	869.240.636
Alat Bengkel	201	396.918.995
Alat Kantor dan rumah tangga	1306	1.539.181.940
Alat studio dan komunikasi	14	72.250.000
Alat laboratorium	26	35.300.000
Bangunan gedung	6	1.621.146.500
Monumen	2	608.360.000
Jalan dan Jembatan	2	140.334.000
Bangunan air dan irigasi	1	4.454.247
Instalasi	2	122.247.803
Jaringan	2	47.612.492.
Buku dan perpustakaan	162	137.312.320
Jumlah		8.267.858.933

Dari sarana dan prasarana tersebut diatas 15% merupakan sarana dan prasarana dalam kondisi rusak berat sedangkan sisanya dalam kondisi baik.

3. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran sebesar Rp 4.212.277.054,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Anggaran Belanja 2017
Dinas Sosial Kabupaten Batang

No.	Jenis Pembiayaan	Nilai (Rp.)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.024.012.554,-
2	Belanja Langsung :	
	- Belanja Pegawai	Rp. 649.000.000,-
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.189.214.500,-

	- Belanja Modal	Rp. 350.050.000,-
	Jumlah	Rp. 4.212.277.054,-

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, ternyata masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi terutama di bidang sosial antara lain adalah :

1. Masih Kurangnya SDM Bidang kesos yang menunjang pelaksanaan tugas baik dari segi kuantitas dan kualitas/kualifikasi.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesetiakawanan sosial, yang merupakan modal dasar pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Program pembangunan kesejahteraan sosial yang belum terintegrasikan dengan baik antar sektor

C. MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). LKJIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Batang tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2017 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Batang, maksud dan tujuan serta dasar hukum penyusunan LKJIP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menyajikan ikhtisar sasaran utama yang ingin diraih pada tahun 2017, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menyajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Bab IV : Penutup

Lampiran – lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dinas Sosial Kab. Batang merupakan OPD baru pemisahan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang, serta Peraturan Bupati Peraturan Bupati Batang No 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Adapun uraian mengenai ikhtisar perencanaan kinerja Dinas Sosial pada tahun 2016 sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Karena adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka Perencanaan kinerja Dinas Sosial Kab. Batang tahun 2017 disusun berdasarkan dokumen Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2012-2017 yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang periode tahun 2012 – 2017 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Batang periode tahun 2012-2017 adalah " *Terwujudnya manusia trampil dan berkarya menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan sosial* ".

Rumusan visi Dinas Sosial Batang Tahun 2012 – 2017, yang diambil dari Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Batang memiliki beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan substansi dan filosofinya yaitu :

1. Trampil, berarti upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai manusia yang trampil untuk memperoleh suatu pekerjaan.
2. Berkarya , membangkitkan semangat dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar mampu mencapai suatu keberhasilan yang diharapkan.
3. Sejahtera, diartikan mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera dapat menunaikan tugas dan tanggungjawabnya dan mencapai kehidupan yang baik
4. Berkeadilan sosial, diartikan bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial)

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan sosial dan meningkatkan jiwa kesetiakawanan sosial guna mewujudkan keadilan sosial
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja.
3. Menciptakan kondusifitas Hubungan Industrial, guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan iklim investasi daerah.
4. Meningkatkan penggerakan dan penempatan transmigrasi serta peningkatan kerja sama antar wilayah dalam rangka pengembangan transmigrasi.

Dalam Renstra Tersebut, Visi dan Misi tersebut dijabarkan lebih operasional ke dalam 4 (empat) Tujuan dan 6 (enam) sasaran, yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang ada. Adapun Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Dinsosnakertrans

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Tujuan 1. Mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial		
1	Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PGOT yang di kirim ke balai rehabilitasi sosial
		Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitasi pelatihan
		Jumlah PMKS yang diberi bantuan
		Jumlah PMKS yang diberikan Jaminan Sosial
2	Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah dunia usaha yang ikut serta dalam pembangunan kesos
Tujuan 2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat untuk berkarya		
3	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pelayanan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
4	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja	Rasio Pencari kerja yang ditempatkan (AKAN, AKAD, AKL)
		Rasio lowongan pekerjaan yang tersedia
Tujuan 3. Menciptakan kondusifitas Hubungan Industrial, guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan iklim investasi daerah		
5	Kondusifitas hubungan industrial	Rasio Angka kepesertaan jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)

		Rasio Angka wajib lapor
		Rasio Besaran pemeriksaan perusahaan
		Rasio Besaran perusahaan yang mempunyai aturan K3
		Rasio Perusahaan yang telah membuat Peraturan perusahaan
Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, dan peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa		
6	Meningkatkan penyelenggaraan penempatan transmigrasi	Jumlah Calon transmigran yang difasilitasi

Dikarenakan pada tahun 2017, Dinas Sosial hanya melaksanakan urusan wajib terkait pelayanan dasar bidang sosial saja, maka pada laporan pencaapaian kinerja ini hanya akan fokus pada tujuan dan sasaran yang terkait bidang sosial, yaitu :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Dinsos

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Tujuan 1. Mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial		
1	Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PGOT yang di kirim ke balai rehabilitasi sosial
		Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitasi pelatihan
		Jumlah PMKS yang diberi bantuan
		Jumlah PMKS yang diberikan Jaminan Sosial
2	Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah dunia usaha yang ikut serta dalam pembangunan kesos

B. Penetapan Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Batang telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis Dinas Sosial tahun 2012-2017 namun demikian seiring dengan perjalanan waktu pelaksanaan pekerjaan pekerjaan terdapat hambatan dan kesulitan seperti pengurangan anggaran maupun pengurangan sumberdaya manusia akibat mutasi ataupun pensiun.

Terkait dengan hal tersebut, Kami melakukan penyesuaian terhadap sasaran dan indikator kinerja yang kami tetapkan dalam Penetapan Kinerja pada tahun 2017. Penyesuaian tersebut bertujuan agar sasaran dan indikator kinerja Penetapan Kinerja 2017 dapat selaras

dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial. Rincian Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang tahun 2017 setelah penyesuaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
 Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang
 Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
1	Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PGOT yang di kirim ke balai rehabilitasi sosial	50 Orang	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Kegiatan : 1. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 2. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitasi pelatihan	100 Orang	
		rasio PMKS (korban bencana) yang diberi Pelayanan Kebencanaan	100 %	
		Jumlah PMKS yang diberi bantuan	150 orang	
		Jumlah PMKS yang diberikan Jaminan Sosial	20.000 KPM	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan : 1. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 2. Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 3. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 4. Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

				<p>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat (PKH)
2	Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah dunia usaha yang ikut serta dalam pembangunan kesos	60 Perusahaan	<p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 2. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 3. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Batang. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
Lebih dari 100%	Sangat Berhasil/sangat baik
75 s/d 100%	Cukup Berhasil/cukup baik
55 s/d 75%	Kurang Berhasil/kurang baik
Kurang dari 55	Tidak Berhasil/tidak baik

Pengukuran dan analisis kinerja yang kami sajikan pada LKJIP tahun 2017 berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Sosil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.

A. PENGUKURAN KINERJA

Dinas Sosial Kabupaten Batang pada tahun 2017 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2017. Hasil pengukuran kinerja secara mandiri (self asesment) adalah sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2017

No	Uraian Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			

	1	Jumlah PGOT yang di kirim ke balai rehabilitasi sosial	50 Orang	33 orang	66 %
	2	Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitasi pelatihan	100 Orang	120 orang	120 %
	3	rasio PMKS (korban bencana) yang diberi Pelayanan Kebencanaan	100 %	100 %	100 %
	4	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	150 orang	193 orang	128,67 %
	5	Jumlah PMKS yang diberikan Jaminan Sosial	20.000 KPM	21.702 KPM	108,51 %
		Rata-Rata Capaian Sasaran			103,67 %
2		Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial			
	1	Jumlah dunia usaha yang ikut serta dalam pembangunan kesos	60 Perusahaan	70 Perusahaan	116,67 %
		Rata-Rata Capaian Sasaran			116,67 %
Rata-Rata Capaian Kinerja					106,64 %

Secara kumulatif rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Batang adalah 106,64% atau kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang **Sangat Baik**. Adapun keberhasilan atau hambatan yang terjadi diuraikan dalam analisis hasil pengukuran kinerja.

B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tujuan tersebut mencakup 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1) Sasaran Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Kegiatan :

1. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
 2. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan :
1. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
 2. Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
 3. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 4. Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kegiatan :
1. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat (PKH)
- 2) Sasaran Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kegiatan :
1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 2. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
 3. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut dalam Tujuan Mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi					% Capaian	% Kenaikan / penurunan
			2017	2016	2015	2014	2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial									
1	Jumlah PGOT yang di kirim ke balai rehabilitasi sosial	50 orang	33 orang	33 orang	21 orang	82 orang	108 orang	66 %	0 %
2	Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitasi pelatihan	100 orang	120 orang	24 orang	45 orang	80 orang	108 orang	120%	400 %
3	rasio PMKS (korban bencana) yang diberi Pelayanan Kebencanaan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
4	Jumlah PMKS yang diberi	150	193	250	887	3.209	200	128,67	(22,8) %

	bantuan	orang	orang	orang	orang	orang	orang	%	
5	Jumlah PMKS yang diberikan Jaminan Sosial	20.000 KPM	21.70 2 KPM	22.09 8 KPM	13.17 0 KPM	13.61 3 KPM	13.613 KPM	108,51 %	(1,79) %
Rata-rata capaian kinerja sasaran (1)								103,67 %	75,08%
Sasaran 2. Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial									
1	Jumlah dunia usaha yang ikut serta dalam pembangunan kesos	60 Perusa haan	70 Perus ahaa n	70 Perus ahaa n	27 Perus ahaan	27 Perus ahaan	-	116,67 %	0 %
Rata-rata capaian kinerja sasaran (2)								116,67 %	0%

- i. Capaian kinerja rata-rata sasaran meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 103,67 maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori *Sangat baik*. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 5 (lima) indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan rata-rata 75,08%, dengan keterangan perbandingan pencapaian perindikator sebagai berikut :
- Pada indikator 1 tidak terjadi kenaikan dari pada tahun sebelumnya, hal ini digambarkan mempunyai arti ganda yang berbeda. Arti yang pertama adalah pelayanan Pengiriman yang diberikan kepada PGOT tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dari segi jumlah pengiriman. Dan dapat pula di artikan bahwa permasalahan PGOT tetap bahkan mungkin menurun. Dan semua permasalahan tersebut dapat di selesaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang dengan memberikan fasilitasi rehabilitasi ke balai rehabsos.
 - Pada indikator 2 terjadi kenaikan dari pada tahun sebelumnya sebesar 400%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Batang pada tahun 2017 telah dapat melaksanakan pelatihan sendiri bagi PMKS kepada 3 kelompok atau sejumlah 60 orang. Selain itu terdapat pula kerjasama dengan balai rehaabilitasi sosial milik Kementerian Sosial RI untuk menyelenggarakan pelatihan bagi PMKS eksNapi Sebanyak 50 orang dan 10 orang eks anak nakal.
 - Pada indikator 3 pencapaian kinerja tetap 100% sama seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 ini Dinas Sosial Kab. Batang mampu memberikan pelayanan bantuan bagi korban bencana kepada 30 kk.
 - Pada indikator ke 4 pencapaian kinerja menurun dari tahun sebelumnya sebesar 22,8%.

Pada tahun 2017 Dinas Sosial Kab. Batang telah melakukan perubahan/perbaikan cara perhitungan data penerima bantuan sosial. Bantuan sosial pada tahun 2017 hanya dihitung pada pemberian alat bantu penyandang cacat, dan pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin yang anggota keluarganya ada yang meninggal dunia yang merupakan program unggulan dari Bupati Batang terpilih tahun 2017-2022. Adapun jumlah masyarakat yang diberi bantuan sosial adalah sebanyak 193 orang yang terdiri dari 27 orang diberi bantuan alat bantu penca dan 166 keluarga diberi santunan kematian.

- e) Pada indikator ke 5 pencapaian kinerja menurun dari tahun sebelumnya sebesar 1,79%. Hal ini terjadi karena ada pengurangan penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan. Pengurangan ini dapat disebabkan karena :
1. status penerima manfaat Program Keluarga Harapan ini berubah dari tidak mampu menjadi mampu.
 2. Penerima manfaat tidak komitmen sehingga di keluarkan dari program
 3. Penerima manfaat sudah tidak memiliki komponen dasar pemberian jaminan sosial
- ii. Capaian kinerja sasaran Meningkatkan peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebesar 116,67% maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori *Sangat baik*. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 1 (satu) indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut tidak mengalami perubahan, yang artinya perusahaan-perusahaan yang dituntut ikut berperan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat bertahan dan komitmen. Kedepan sasaran akan lebih ditingkatkan dan diperluas lingkup sasarannya diluar dunia usaha.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Batang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Batang. Dalam pelaksanaannya, Anggaran Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang mengalami perubahan dari yang sebelumnya Rp 4.047.266.761 (Anggaran Petetapan) menjadi Rp. 4.212.277.054,- (Anggaran Perubahan). Perubahan anggaran tersebut, disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan / Pengurangan program kegiatan yang ada;
2. Penambahan / pengurangan jumlah anggaran pada setiap program dan kegiatan
3. Penambahan kegiatan dari program unggulan Bupati Batang terpilih periode 2017-2022 berupa pendampingan santunan kematian bagi masyarakat miskin

Adapun Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan kegiatan dan program per sasaran adalah sebagai berikut :

DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PER SASARAN

No.	Sasaran dan Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
A	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
1	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	94.565.000	90.245.000	95,43
2	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	69.732.500	65.462.900	93,88
B	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
1	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	25.950.000	23.923.658	92,19
2	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center	96.000.000	95.970.000	99,97
3	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	305.000.000	202.539.800	66,41
4	Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	53.000.000	52.312.500	98,7
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	13.000.000	7.509.000	57,76
C	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat (PKH)	300.000.000	277.870.000	92,62
2	Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial			
A	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	38.650.000	28.685.000	74,22
2	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	58.250.000	58.150.000	99,83
3	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	60.000.000	55.373.500	92,29

Adapun untuk realisasi untuk anggaran belanja tidak langsung dan Rutin Dinas Sosial Kabupaten Batang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN RUTIN

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Tidak Langsung			
-	Gaji dan Tunjangan PNS	2.024.012.554	2.009.277.290	99,27
	Belanja Langsung Rutin Dinas			
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	1.312.650	65,63
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.000.000	63.920.357	96,85
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.000.000	15.850.000	99,06
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	62.982.000	62.982.000	100
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.500.000	16.000.000	91,43
6	Penyediaan alat tulis kantor	18.660.000	18.621.500	99,79
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.000.000	15.000.000	93,75
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	19.911.000	99,56
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000	25.000.000	100
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000	3.631.000	90,78
11	Penyediaan makanan dan minuman	34.440.000	34.440.000	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000	149.702.147	99,8
13	Pembayaran honor dan jaminan kesehatan PTT dan Satpam	56.000.000	56.000.000	100
14	Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	53.510.000	53.460.000	99,91
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	53.600.000	52.650.000	98,23
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	0	0	0

	kantor			
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	146.225.000	118.933.550	81,34
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	17.250.000	141.65.000	82,12
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	11.800.000	11.800.000	100
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	291.450.000	289.261.000	99,25
C.	Program peningkatan disiplin aparatur			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9.050.000	8.600.000	95,03
D	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	0
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.650.000	2.650.000	100
TOTAL ANGGARAN RUTIN		1.074.117.000	1.033.890.204	96,25

Dari anggaran secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 4.212.277.054,- terdiri dari belanja langsung maupun tidak langsung, yang terserap untuk mencapai sasaran dan tujuan kinerja adalah sebesar Rp 4.001.208.852,- (94,99%). Yang berarti terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 211.068.202,- (5,01%) yang kemudian kembali pada kas Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kabupaten Batang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Sosial Kabupaten Batang menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja adalah Sangat Baik. Dengan penilaian kinerja sebesar 106,64%;
2. Adapun pencapaian kinerja tiap-tiap sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan nilai 103,67 %
 - b. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan nilai 116,67 %

Saran :

1. Walaupun capaian kinerja tahun 2017 termasuk dalam kategori sangat baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
3. Perlu adanya perbaikan dan keselarasan sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja utama. Salah satu kendala penyusunan laporan kinerja ini adalah belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat. Dengan kata lain pengukuran kinerja tidak akan mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya apabila indikator kinerja tidak dirumuskan dengan tepat.

Demikianlah laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Batang tahun 2017 dibuat, sebagai wujud keterbukaan, tanggung jawab dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Batang. Sekian terima kasih

Batang, Januari 2018

KEPALA DINAS SOSIAL,
KABUPATEN BATANG

SUGIATMO, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610112 198903 1 011